

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu masalah yang sering terjadi di negara maju maupun negara berkembang adalah tingkat kemiskinan. Sebagai negara berkembang, masalah kemiskinan di Indonesia menjadi perhatian yang utama. Oleh karena itu, upaya cara penanggulangan tingkat kemiskinan sebaiknya dilakukan secara menyeluruh dan mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pada realitanya tingkat kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat sulit dicari solusinya. Oleh sebab itu, pemberantasan persoalan tingkat kemiskinan wajib menjadi keutamaan dalam pembangunan ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Salah satu masalah klasik dan hingga kini masih menjadi masalah bersama adalah masalah kemiskinan. Hampir seluruh periode pemerintahan Indonesia menempatkan kemiskinan sebagai isu pembangunan. Kemiskinan secara umum merupakan penyakit yang sangat serius dalam aspek ekonomi pembangunan, meningkatnya angka kemiskinan akan menjadi ancaman dalam suatu iklim perekonomian di suatu negara, sehingga harus dihilangkan paling tidak dikurangi agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan ini, karena permasalahan kemiskinan bersifat kompleks dan multidimensi (Susi dan Rita, 2012).

Pemerintah juga telah banyak menetapkan program-program pembangunan yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan. Namun, program-program ini belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak

pada lapisan masyarakat yang paling miskin, tetapi hal ini membuktikan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Kemiskinan adalah suatu kegagalan untuk berfungsinya beberapa dasar atau dengan perkataan lain seseorang dikatakan miskin jika kekurangan kesempatan untuk mencapai atau mendapatkan kemampuan dasar ini. Ada dua faktor-faktor penyebab kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi karena disebabkan faktor-faktor eksternal atau faktor yang diluar jangkauan individu. Kondisi masyarakat yang disebut miskin dapat diketahui berdasarkan kemampuan pendapatan yang memenuhi standart hidup. Kedua, pada prinsipnya tersebut standart hidup di suatu masyarakat tidak sekedar mencukupi kebutuhan pangan, tetapi juga tercukupinya kebutuhan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal atau pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standart hidup ataupun standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah (Al Falah, 2017).

Kemiskinan juga menjadi permasalahan dalam perekonomian Provinsi Riau. Peningkatan kemiskinan relatif lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Hal ini terjadi dikarenakan jumlah penduduk yang tinggi serta tidak didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang memadai, sempitnya kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, serta PDRB perkapita akar dari permasalahan kemiskinan. selain itu, juga disebabkan Indeks Pembangunan Manusia yang masih kurang memadai dan jumlah pengangguran yang semakin meningkat (Susi dan Rita, 2012).

Urbanisasi juga dapat menyebabkan tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan akses terhadap suatu lapangan pekerjaan, lahan, pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Persaingan dalam mendapatkan suatu akses terhadap lapangan pekerjaan bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran. Masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, keterampilan yang berkualitas akan lebih memiliki peluang untuk mendapatkan akses pekerjaan. Sebaliknya masyarakat yang tidak mampu bersaing akan mengakibatkan peningkatan pengangguran. Peningkatan pengangguran akan berdampak pada penurunnya tingkat pendapatan yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, jika peningkatan pengangguran meningkat dan kesejahteraan masyarakat menurun maka terjadinya peningkatan jumlah kemiskinan yang ada di Provinsi Riau (Ari Kuncoro, 2015).

Pemerintah Provinsi Riau juga telah banyak menerapkan berupa program-program pembangunan yang bertujuan untuk mengatasi tingkat kemiskinan. Namun, program – program ini masih belum memiliki strategi dan kebijakan yang tepat karena tidak langsung berpihak kepada masyarakat yang paling miskin, tetapi hal ini sangat membuktikan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi Riau merupakan salah satu masalah sosial yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Berikut data tingkat kemiskinan Provinsi yang ada di Sumatra pada tahun 2011-2020 dapat dilihat pada dibawah ini:

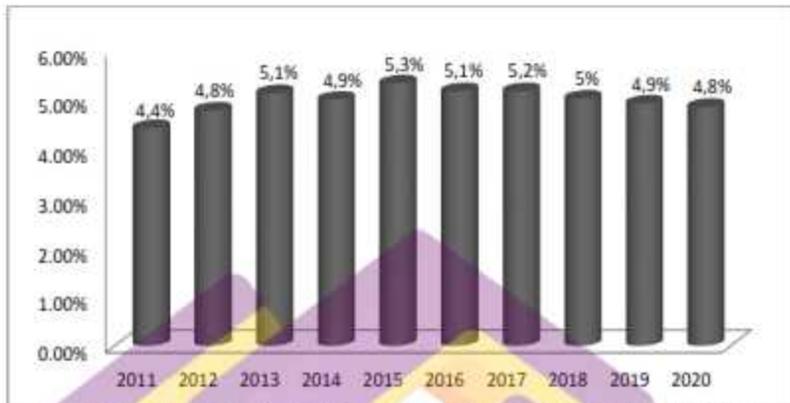
Tabel 1.1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2020 (%)

Provinsi	Tingkat Kemiskinan Tahun 2020 (persen)
Aceh	15,43
Sumatra Utara	9,14
Sumatra Barat	6,56

Riau	7,04
Jambi	7,97
Sumatra Selatan	12,98
Bengkulu	15,30
Lampung	12,76
Kep. Bangka Belitung	4,89
Kep. Riau	6,13

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Bedasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa Provinsi Riau pada tahun 2020 memberikan kontribusi yaitu tingkat kemiskinan ke empat di Pulau Sumatra yakni sebesar 7,04%. Tingkat kemiskinan ke tiga di Pulau Sumatra yaitu Provinsi Sumatra Barat yakni sebesar 6,56 %Tingkat kemiskinan ke dua berikutnya di Pulau Sumatra yaitu Provinsi Kep. Riau yakni sebesar 6,13%. Tingkat kemiskinan yang pertama di Pulau Sumatra yaitu Provinsi Kep. Bangka Belitung yakni sebesar 4,89%. Provinsi Riau Tingkat kemiskinannya masih di katakan tinggi di karenakan masih ada tingkat kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Riau. Berikut data tingkat kemiskinan yang ada di provinsi Riau pada tahun 2011 – 2020 dapat dilihat pada dibawah ini:



Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 (%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan dari gambar 1.1. menjelaskan data kemiskinan di Provinsi Riau 2011-2020. Presentase kemiskinan di Provinsi Riau dari tahun 2011-2020 menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun tidak terlalu signifikan pada perkembangannya. Selama sepuluh tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Provinsi Riau meningkat sebesar 0,4% dari 4,4% tahun 2011 meningkat menjadi 4,8% pada tahun 2020, sehingga diperlukan usaha pemerintah dalam mengambil kebijakan untuk menekan angka kemiskinan. Grafik menunjukkan perkembangan presentase angka kemiskinan di Provinsi Riau dari tahun 2011-2020.

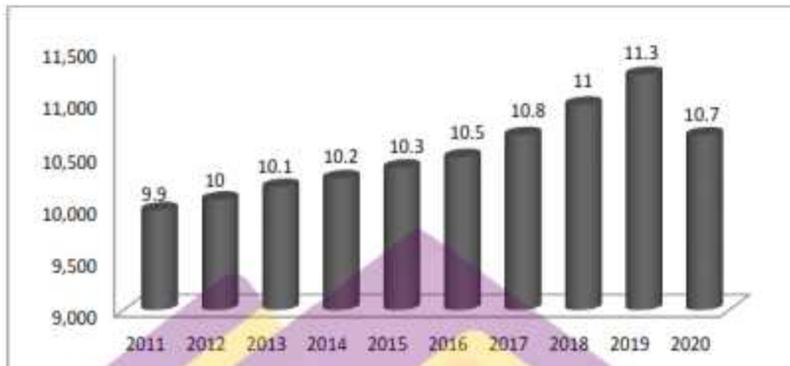
Meningkatnya kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2015 yakni sebesar 5,3%, peningkatan ini disebabkan karena lokasi penduduk miskin yang cenderung tersebar di wilayah perdesaan dan akses jalan masih tergolong sulit sehingga pemerintah masih sulit menjangkau masyarakat yang berada di desa tersebut. Selanjutnya pada tahun 2020 kemiskinan di Provinsi Riau cenderung menurun yakni menjadi 4,8%, hal ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan bantuan pangan, biaya kesehatan, pendidikan, memperluas kesempatan kerja dan

pembangunan sebagai sektor yang menyangkut erat dengan lapangan pekerjaan keluarga miskin seperti sektor pertanian.

Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan yang cepat. Pertumbuhan ekonomi belum cukup untuk menghilangkan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonom merupakan suatu yang dibutuhkan, pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan yang tinggi (Putu Purbadharmaja, 2015).

Tujuan utama dalam pembangunan selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan ekonomi antar daerah dan tingkat pengangguran. Keberhasilan di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan suatu daerah dapat berjalan dengan baik jika kesejahteraan masyarakat meningkat. Berhasilnya pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari laju penurunan penduduk miskin (Heidy Menajang, 2019).

Faktor yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat bisa di akibatkan oleh Pengeluaran per kapita, Rata-rata lama sekolah, Upah minimum dan Jumlah penduduk. Dari keempat faktor tersebut memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Permasalahan tingkat kemiskinan selalu harus diupayakan solusi yang tepat karena proses pembangunan perlu melakukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Berikut data yang menggambarkan tingkat pengeluaran per kapita di provinsi Riau dari tahun 2011 – 2020 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2. Pengeluaran per kapita di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 (Ribu Rupiah)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan dari gambar 1.2, menjelaskan data Pengeluaran per kapita di Provinsi Riau tahun 2011-2020. Pengeluaran per kapita di Provinsi Riau menunjukkan kecenderungan meningkat signifikan pada perkembangan dari tiap tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir, pengeluaran per kapita di Provinsi Riau meningkat sebesar Rp1.298 Ribu Rupiah dari Rp9.957 Ribu Rupiah pada tahun 2011 meningkat menjadi Rp11.255 Ribu Rupiah pada tahun 2019, sedangkan dari tahun 2019- 2020 mengalami penurunan sebesar Rp580 Rupiah, dikarenakan jumlah pendapatan yang menurun dan akan mengakibatkan pengeluaran juga menurun, sehingga diperlukan pemerintah untuk menyelesaikan angka kemiskinan di Provinsi Riau.

Pengeluaran perkapita meningkat di Provinsi riau pada tahun 2019 disebabkan karena besarnya biaya pengeluaran atas barang dan jasa yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Pengeluaran perkapita di Provinsi Riau pada tahun 2020 cenderung menurun, hal ini disebabkan karena adanya pengurangan tenaga kerja yang disebabkan virus covid-19 yang melanda

Provinsi Riau sehingga banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja mengakibatkan masyarakat harus mengurangi pengeluaran perkapita agar kebutuhannya dapat terpenuhi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pengeluaran perkapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi per orang di semua anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkapkan tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator porsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin tinggi jumlah pengeluaran untuk makanan maupun non makanan maka semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor yang dapat menyebabkan tingkat kemiskinan semakin meningkat adalah pendidikan. Pendidikan secara umum adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Pendidikan merupakan usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Itang, 2017).

Pendidikan dikatakan mampu untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik sehingga dapat menambah pendapatan seorang. Pendidikan merupakan salah satu indikator utama pembangunan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga

kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan bidang yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan nasional, karena merupakan salah satu penentu kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bahkan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesejahteraan masyarakat, serta dapat meningkatkan bangsa mencapai kemakmuran. Pendidikan perlu mendapatkan sorotan dalam mengatasi kebodohan serta ketertinggalan sosial ekonominya. Berikut adalah perkembangan dan pertumbuhan kualitas sumber daya manusia di provinsi Riau yang di ukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah pada tahun 2011-2020 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.3. Rata-Rata Lama Sekolah di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 (%)
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Berdasarkan Gambar 1.3. perkembangan rata-rata lama sekolah di Provinsi Riau tahun 2010 hingga 2020 menunjukkan bahwa perkembangan yang signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya persentase rata-rata lama sekolah setiap tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir, rata lama sekolah di

Provinsi Riau meningkat sebesar 0,85% dari 8,29% pada tahun 2011 meningkat menjadi 9,14% pada tahun 2020.

Rata-rata lama sekolah berdasarkan gambar diatas tahun 2011 sampai 2020 menunjukkan kenaikan yang signifikan setiap tahunnya, bahkan tidak terjadi penurunan satu angka pun setiap tahunnya. Sehingga berdampak pula pada penurunan kemiskinan di Provinsi Riau. Rata-rata lama sekolah setiap tahunnya meningkat disebabkan karena banyak penduduk yang dapat menyelesaikan pendidikannya hingga tamat.

Rata lama sekolah mengukur capaian pembangunan manusia yang bertumpu pada beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, indeks pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut menyangkut umur dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir, kemudian untuk mengukur pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak (Ni Putu Dera Yanthi, 2016).

Pembangunan melalui pendidikan dapat dikatakan sangat penting agar menekan tingkat kemiskinan, selain itu agar penduduk memperoleh pekerjaan yang lebih baik harus disertai pendidikan dan keahlian yang baik. Salah satu dari

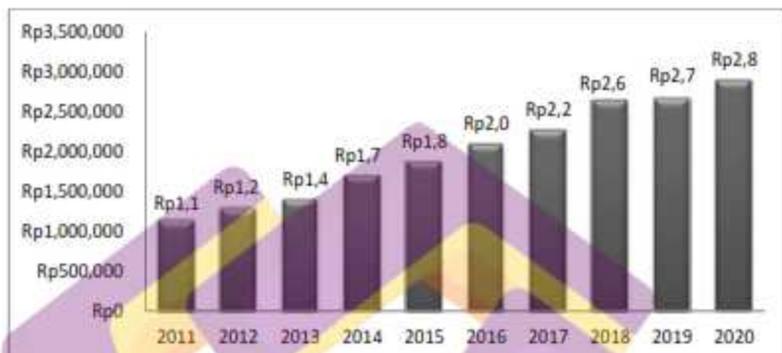
penyebab kemiskinan terjadi secara alamiah tergantung dari kondisi wilayah ataupun potensi wilayah tersebut berakibat pada tenaga kerja pada masing-masing lapangan usaha (Ida Bagus Darsana, 2018).

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan adalah upah minimum. Menurut Khabibi (2013), menjelaskan gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, sehingga dapat diharapkan menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup serta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan buruh.

Ketika upah riil berada di atas yang menyeimbangkan penawaran dan permintaan, jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta. Kekuatan upah riil mengurangi tingkat perolehan kerja dan meningkatnya pengangguran. Pengangguran yang disebabkan kekuatan upah dan penjatahan pekerjaan disebut pengangguran struktural. Ketiga pemerintah mempertahankan agar upah tidak mencapai tingkat keseimbangan maka dapat menimbulkan kekakuan upah.

Kebijakan upah minimum adalah salah satu strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menghitung kebutuhan dasar seperti pangan, sandang dan perumahan, sekaligus sebagai jaringan pangan sosial dengan menghitung kebutuhan pendidikan dasar dan jasa tranfortasi (Riva, 2014). Berikut

data jumlah tingkat Upah Minimum pada tahun 2011- 2020 dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.4. Upah Minimum di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 (Juta)
Sumber: Badan Pusat Statistik di Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.4. dapat diketahui bahwa upah minimum memiliki pergerakan yang membaik begitu signifikan, hal tersebut dapat dilihat naik turun ditahun 2011 hingga 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari meningkatnya upah minimum setiap tahunnya. Selama sepuluh tahun terakhir, upah minimum di Provinsi Riau meningkat sebesar Rp1.753.563 juta dari Rp1.135.000 juta pada tahun 2011 meningkat menjadi 2.888.563 juta pada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Riau mengambil kebijakan yang sangat tepat untuk mengurangi pengangguran yang memicu pada angka kemiskinan di Provinsi Riau. Dengan adanya tingkat upah minimum yang meningkat tiap tahunnya, hanya sebagian saja yang dapat memenuhi kebutuhan hidup layak. Terbukti dari masih naik turunnya angka kemiskinan.

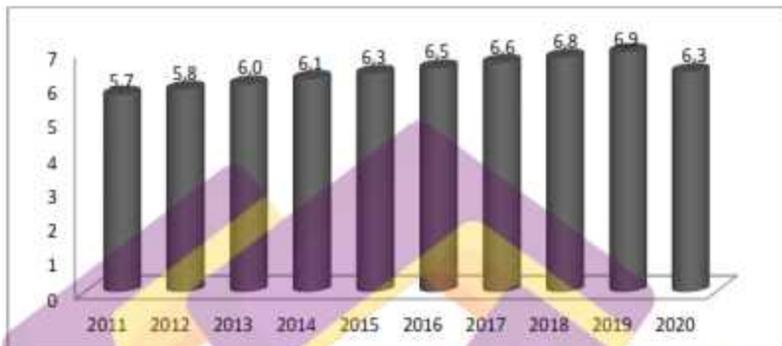
Meningkatnya upah minimum di Provinsi Riau dari tahun 2011 sampai 2020 di sebabkan oleh adanya faktor-faktor yaitu regulasi pemerintah, kemampuan

perusaan, dan kebutuhan hidup layak. Kenaikan tingkat upah minimum akan menaikkan tingkat biaya produksi dan mengakibatkan meningkatnya harga per unit barang yang diproduksi. Peningkatan ini akan lebih berpengaruh positif apabila produktivitas tenaga kerja juga ikut meningkat.

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya peningkatan kemiskinan adalah jumlah penduduk di suatu daerah. Jumlah penduduk dalam pembangunan ekonomi suatu daerah merupakan suatu permasalahan yang mendasar, karena pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan. Jumlah penduduk yang tinggi akan menciptakan angkatan kerja yang besar. Kenaikan jumlah penduduk terus-menerus merupakan unsur yang perlu untuk menunjang tambahan permintaan, namun disisi lain kenaikan jumlah penduduk yang tinggi di khawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk bagi pertumbuhan ekonomi (Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi, 2016)

Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Kenaikan jumlah penduduk tanpa dibarengi dengan kemajuan faktor-faktor perkembangan yang lain tentu tidak akan menaikkan pendapatan dan permintaan. Dengan demikian, tumbuhnya jumlah penduduk justru akan menurunkan tingkat upah dan berartimemperendah pula biaya produksi. Turunnya produksi akan memperbesar keuntungan-keuntungan para kapitalis dan mendorong mereka untuk terus berproduksi. Tetapi keadaan ini hanyalah sementara saja, sebab permintaan efektif akan semakin berkurang karena pendapatan buruh juga

semakin berkurang (Irhamni, 2018). Berikut data jumlah pengangguran di provinsi Riau pada tahun 2011–2020 adalah sebagai berikut:



Gambar 1.5. Jumlah Penduduk di Provinsi Riau Tahun 2011-2020 (Juta Jiwa)
Sumber: Badan Pusat Statistik di Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.5. dapat diketahui bahwa jumlah penduduk memiliki pergerakan yang terus mengalami kenaikan, namun tidak begitu signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari naik turunnya persentase pengangguran di tahun 2011-2020. Peningkatan jumlah penduduk yang paling tertinggi yakni pada tahun 2019 yakni sebesar 6,9 juta jiwa. Jika dilihat pada gambar 1.5. tingkat pengangguran yang tinggi tersebut ternyata tidak banyak mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan di provinsi Riau cenderung menurun. Jumlah penduduk terendah yakni pada tahun 2011 sebesar 5,7 juta jiwa. Pada tahun 2020 jumlah penduduk menurun diakibatkan banyak masyarakat Riau yang awalnya seorang imigrasi dan netap diriau, dikarenakan faktor sempitnya lapangan pekerjaan sehingga banyak masyarakat yang awalnya sudah menetap tetapi kembali lagi ke daerah asalnya.

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Provinsi Riau pada tahun 2019 disebabkan oleh jumlah angka kelahiran yang terlalu tinggi. Jumlah penduduk

yang tinggi di Provinsi Riau juga disebabkan oleh migrasi. Provinsi Riau dikenal sebagai daerah yang merupakan kawasan yang secara khusus dikembangkan untuk industri sehingga banyak masyarakat yang bermigrasi ke daerah tersebut untuk mencari pekerjaan. Jumlah penduduk di tahun 2020 mengalami penurunan, ini sebabkan oleh penyebaran virus covid-19 yang melanda Provinsi Riau di tahun 2020. Virus ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terpapar virus tersebut dan mengakibatkan meninggal dunia.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan Gayuh Rivanti (2017), menjelaskan bahwa angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa tengah. Sedangkan penelitian Aida Meimela (2019), menunjukkan bahwa pengeluaran per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian Rizki Dita Aorilia (2016), menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan pendidikan berpengaruh negatif, sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Jawa Timur.

Ada beberapa faktor yang berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Penelitian Elleys Prajawati (2012), menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif, sedangkan PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Yogyakarta. Penelitian Syafri dan Putri Aulia Febriana (2021), menjelaskan bahwa PDRB, jumlah penduduk, dan pengangguran berpengaruh positif, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Riau.

Hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh variabel pengeluaran per kapita, rata lama sekolah, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di satu daerah atau negara yang terdapat perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut terdapat ketimpangan antara hasil penelitian satu dengan yang lainnya. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dengan mengganti periode data penelitian yang pada penelitian terdahulu, maka pada penelitian ini peneliti mengambil 10 tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk menganalisa pengaruh pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah, upah minimum, dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Riau. Penulis mengambil judul “ Analisis Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau”. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui penguaraan per kapita, rata-rata lama sekolah, upah minimum dan jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan, terutama di provinsi Riau yang memiliki persentase penduduk miskin yang belum stabil.

1.2. Rumusan Masalah

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang kompleks dan multidimensional bagi pembangunan ekonomi, sehingga diperlukan upaya untuk menghindari atau mengurangi tingkat kemiskinan. Peningkatan kemiskinan relatif lebih tinggi terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah perdesaan, hal ini terjadi karena jumlah penduduk yang tinggi serta tidak didukung oleh pendidikan dan keterampilan yang memadai, sempitnya kesempatan kerja, serta

pendapatan perkapita akar dari permasalahan kemiskinan. Urbanisasi juga dapat menyebabkan tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan akses terhadap suatu lapangan pekerjaan, pemenuhan kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan pernyataan-pernyataan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengaruh rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
3. Bagaimana pengaruh upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?
4. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh variabel pendapatan per kapita terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
2. Untuk menganalisis pengaruh variabel rata-rata lama sekolah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.
3. Untuk menganalisis pengaruh variabel upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Peneliti

Penelitian ini dapat sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan wawasan sehingga penulis dapat mengetahui bagaimana tingkat kemiskinan di Riau. Peneliti juga dapat menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di perkuliahan khususnya mengenai faktor apa saja yang dipengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Riau.

2. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi dalam memperluas wawasan mengenai tentang apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Riau secara teori maupun secara praktek saat ini dan yang akan mendatang.

3. Akademik

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi pengetahuan mengenai apa saja faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan serta menambah referensi berupa daftar pustaka baru yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa ataupun mahasiswa selanjutnya.

4. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau acuan dalam mengambil kebijakan yang tepat dalam memperbaiki tingkat kemiskinan di Riau dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

1.5. Sistematika Bab

Sistematika bab menjelaskan tentang uraian ringkasan dari materi yang dibahas pada setiap bab dengan tujuan untuk menjelaskan dan ketepatan arah pembahasan dalam penelitian ini agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan lebih jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah penelitian, rumus masalah penelitian, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini membahas tentang landasan teoripenelitian dan membahas hasil-hasil penelitian tertahulu, kerangka pemikiran penelitian, serta hipotesis penelitian.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi sumber variabel, teknik analisis data.

4. Bab IV Analisis dan Pembahasan

Bab ini membahas tentang deskripsi dari data penelitian dan juga menyajikan hasil analisis serta pembahasan.

5. Bab V Penutup

Bab ini membahas tentang kesimpulan-simpulan yang di ringkas dari bagian pembahasan yang dilakukan pada bagian sebelumnya.

